



Media Komunikasi dan Informasi Anggota GAPKI

GAPKI

NEWS

Edisi 01 November 2023

Bursa CPO
dari Mandatory
Menjadi Voluntary

Ini Lima
Rekomendasi
Andalas Forum IV

GAPKI
Implementasikan
PSR Jalur Kemitraan

**IPOC, Cermin Komoditas Sawit
Kini dan Masa Depan**



www.gapki.id



gapkiIPOA.id@gmail.com



[gapkiIPOA](https://www.instagram.com/gapkiIPOA)



[GAPKI](https://www.facebook.com/GAPKI)



Komunikasi Organisasi Memperkuat Sinergi

Pembaca yang budiman,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena rencana Pengurus GAPKI Pusat periode 2023-2028 memiliki media komunikasi dan informasi anggota GAPKI terwujud. Sesuai misi yang diemban sebagai sarana komunikasi serta informasi antaranggota GAPKI, media ini menyandang nama *GAPKINews*. Dikemas sebagai buletin dalam format PDF, media ini tentu akan melengkapi sarana komunikasi lain yang telah dimiliki GAPKI seperti *website*. Media ini direncanakan dapat terbit setiap dua bulan secara rutin.

Sebagai media komunikasi dan informasi, *GAPKINews* akan menghadirkan berbagai informasi tentang kegiatan asosiasi yang bersifat internal maupun eksternal. Selama ini, GAPKI memiliki berbagai kegiatan antaranggota maupun kegiatan yang bersifat kolaboratif dengan pihak lain seperti pemerintah, asosiasi profesi, organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial, dan lain-lain. Semua kegiatan itu tentu memiliki nilai yang sangat berarti bagi perjalanan organisasi ini.

Dalam edisi perdana *GAPKINews*, kami telah memilah dan merangkum kegiatan GAPKI dalam beberapa bulan terakhir. Dimulai dari pengukuhan Pengurus GAPKI 2023-2028 hasil Munas XI di Bali pada 8-10 Maret 2023, pelantikan beberapa pengurus GAPKI cabang, menjadi narasumber dalam berbagai forum, hingga kegiatan yang berskala global. Tentu saja yang paling menyita perhatian adalah respon GAPKI terhadap kebijakan Uni Eropa tentang EUDR.

Kebijakan tentang EUDR, PSR, FPKM, dan tata kelola sawit akibat kawasan hutan masuk dalam konsesi perkebunan sawit, bahkan yang sudah memiliki HGU menjadi isu penting bukan hanya untuk GAPKI, namun sudah menjadi isu yang menyangkut kedaulatan negara. Apalagi yang dipersoalkan bukan kebijakan setingkat menteri, namun undang-undang persekutuan negara-negara Eropa. Karena itu, dalam merespon EUDR, GAPKI berperan sebagai mitra strategis pemerintah karena merespon EUDR harus dilakukan secara *government to government*.

Topik lain yang menarik adalah upaya GAPKI memperluas pasar ekspor CPO Indonesia untuk mengantisipasi kondisi yang tidak pasti ke depan. Di sisi lain, penguatan organisasi dilakukan untuk menyatukan visi tentang perjalanan GAPKI ke depan.

Selama 10 bulan terakhir hingga Oktober 2023, terdapat ratusan kegiatan baik GAPKI Pusat maupun GAPKI Cabang yang juga merupakan bentuk layanan untuk anggota. Namun, belum semua kegiatan itu dapat termuat pada edisi perdana ini.

Semoga kehadiran *GAPKINews* edisi perdana ini mampu memberikan nuansa baru dalam kehidupan organisasi kita. Selamat membaca dan terima kasih.

Salam,
Redaksi GAPKINews

GAPKINews

Media Komunikasi dan
Informasi Anggota GAPKI

PENERBIT

GAPKI Pusat

PEMBINA

Eddy Martono
Sany Anthony
Susanto Yang
Satrija B. Wibawa
M. Hadi Sugeng
Mona Surya

PENGARAH

Mukti Sardjono

TIM AHLI

Para Ketua Bidang
Pengurus Pusat GAPKI

PENANGGUNG JAWAB

Fenny Sofyan

Dewan Redaksi

Yudha Negara Nyoman
Indah Permata Soegyarto
Ratri Melanda Maharani
Dyah Laras Wulandari
Susan Sri Rahayu
Eko Tamba

ALAMAT

Kantor GAPKI Pusat
Sudirman Park Blok B-18
Jalan KH Mas Mansur Kav. 35
Jakarta 10220

(+62) 21-5794-3871

gapki@gapki.id | gapkipusat@
yahoo.com



Yakinkan Manfaat Sawit, Indonesia-Malaysia Gencarkan Promosi di India



10,11

- 2. Salam Redaksi
Komunikasi Organisasi
Memperkuat Sinergi
- 3. Daftar Isi
- 4. Sambutan
Ketua Umum GAPKI
- 5,6. IPOC
IPOC, Cermin Komoditas
Sawit Kini dan Masa Depan
- 7. Organisasi
GAPKI Diminta Semakin Aktif
Mewujudkan Perkebunan
Sawit Berkelanjutan
- 8,9. Luar Negeri
Peran Sentral GAPKI
dalam Misi Bersama
Indonesia-Malaysia



12

Indonesian Night, Promosi Minyak Sawit di Uzbekistan



16

Menanam Mangrove, Melestarikan Lingkungan



18,19

Komitmen dan Kolaborasi GAPKI CEGAH KARHUTLA

13. Perdagangan & Promosi Bursa CPO dari Mandatory Menjadi Voluntary

14,15. Pengembangan SDM Komitmen GAPKI: Menghapus Pekerja Anak dan Melindungi Pekerja Perempuan

17. Percepat PSR GAPKI Implementasikan PSR Jalur Kemitraan

20. Organisasi Ini Lima Rekomendasi Andalas Forum IV Tahun 2023

21. Organisasi Ketua Umum GAPKI Lantik Ketua GAPKI Sumatera Utara

22. Organisasi Syaiful Panigoro Nakhoda Baru Kalimantan Tengah

24. Organisasi GAPKI tambah Cabang, GAPKI Papua Terbentuk di Bumi Cendrawasih

25. Riset & Inovasi Sinkronasi Program Riset GAPKI dan BDPKS

26. Komunikasi GAPKI Perkuat Sinergi dengan Media Massa

27,28. Komunikasi GAPKI Membangun Relasi Media Secara Konsisten

GAPKI Sulawesi Tingkatkan Kolaborasi dengan Pemda



23



Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuhu
Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua

Anggota GAPKI yang terhormat,

Sebagai asosiasi perkumpulan para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit sektor hulu, tahun ini Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) telah memasuki usia 42 tahun. Usia ini bukan sekadar rentang sebuah waktu, namun juga tentang kematangan maupun pengalaman. Didirikan pertama kali pada 27 Februari 1981, GAPKI berperan signifikan dalam menjalankan sinergi antarpengusaha, menciptakan iklim usaha dan investasi yang komprehensif, hingga melakukan advokasi dan konsultasi regulasi sebagai mitra strategis pemerintah.

Semua program kerja yang telah dijalankan oleh GAPKI semakin menunjukkan betapa penting peran GAPKI dalam dunia perkelapasawitan di Indonesia. Peran GAPKI bukan hanya dirasakan oleh perusahaan anggota, namun juga oleh pemerintah hingga masyarakat luas. Namun, GAPKI tidak boleh berpuas diri karena tantangan ke depan semakin berat. Karena itu, gerak langkah GAPKI Pusat maupun GAPKI Cabang perlu diinformasikan dan dikomunikasikan sehingga setiap anggota mendapatkan informasi secara langsung.

Pengurus GAPKI periode 2023-2028 hasil Musyawarah Nasional XI di Bali pada 8-10 Maret 2023 telah mencanangkan betapa pentingnya penguatan komunikasi dan informasi bagi seluruh anggota GAPKI. Karena itu, dengan kerendahan hati, GAPKI meluncurkan buletin GAPKINews sebagai media komunikasi dan update informasi kunci terkait industri sawit.

Melalui GAPKINews, diharapkan seluruh anggota GAPKI mendapatkan update informasi terkait kegiatan dan aktivitas asosiasi dalam memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan anggota, termasuk berbagai informasi yang berhubungan dengan industri kelapa sawit.

Anggota GAPKI yang terhormat,

Peran GAPKI yang semakin signifikan, baik dalam skala nasional maupun global, mendorong GAPKI harus terus adaptif dan mampu menjadi representasi industri sawit nasional. Salah satu kuncinya adalah terus berkonsolidasinya antaranggota. Hal ini bertujuan untuk menutup celah bagi pihak-pihak tertentu yang terus-menerus dan tiada hentinya melakukan kampanye negatif terhadap komoditas sawit Indonesia.

Ada beberapa isu besar di industri sawit yang bisa di-framing atau digoreng untuk kepentingan tertentu. Misalnya, Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) 20%, Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dan pemberian izin PKS tanpa kebun. Belum lagi isu yang terus dikampanyekan seperti 'pemutihan' atau 'kebun di kawasan hutan' untuk membangun stigma negatif seakan-akan perkebunan kelapa sawit sudah salah sejak awal. Tentu saja hal-hal seperti ini tidak dapat kita diamkan dan dibiarkan begitu saja.

Anggota GAPKI yang terhormat,

Guna mencegah adanya peluang bagi pihak tertentu yang memanfaatkan atau memelintir fakta agar terus tercipta citra negatif bagi sawit, maka perlu terus ditegakkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kita penuhi semua ketentuan peraturan perundangan. Sambil kita terus berupaya agar pemerintah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antarregulasi agar supaya pelaksanaannya semakin sesuai dengan harapan kita semua.

Kehadiran GAPKINews kita harapkan dapat membawa informasi yang jernih dan memberikan manfaat yang optimal untuk anggota GAPKI khususnya dan negeri kita tercinta pada umumnya. Semoga media ini terus memberikan informasi terbaru tentang kegiatan GAPKI dan kegiatan anggota di berbagai daerah.

Akhir kata, kami mengucapkan salam komunikasi dan bertukar informasi melalui GAPKINews. Selamat menikmati dan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Hormat Kami,

Eddy Martono
Ketua Umum GAPKI





IPOC, Cermin Komoditas Sawit KINI DAN MASA DEPAN



Keragaman tema ini yang membedakan antara IPOC yang diadakan oleh GAPKI dibanding dengan konferensi sejenis yang diadakan oleh Malaysia.

Konferensi internasional ini berlangsung rutin setiap tahun. Tanpa jeda meskipun pandemi Covid-19 sedang mendera negeri ini. Sudah diselenggarakan sejak 2004 dan pada 2023 ini telah memasuki tahun ke-19. Namanya *Indonesian Palm Oil Conference* atau lebih populer dengan sebutan IPOC. Pada tahun 2004 dan 2005 even ini masih menggunakan nama GAPKI Conference. Nama IPOC mulai digunakan sejak tahun 2006. Even global ini menjadi salah satu andalan GAPKI karena mempertemukan para pemangku kepentingan dunia sawit tidak hanya dari Indonesia, namun juga puluhan negara lain. Tahun ini, IPOC 2023 and 2024 Price Outlook diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 1-3 November 2023 dengan tema *Enhancing Resiliency Amid Market Uncertainty*.

Tema yang diangkat dalam IPOC mencerminkan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh industri sawit di Indonesia maupun dunia. "Masalah EUDR sampai sertifikasi ISPO akan menjadi bahasan pada IPOC 2023 ini," kata Ketua Panitia IPOC 2023, Mona Surya. Sepanjang tahun 2023 keputusan Uni Eropa mengesahkan Undang-Undang Anti Deforestasi (EUDR) memang menyita energi negara-negara produsen CPO, terutama Indonesia dan Malaysia.

Isu tentang komoditas sawit Indonesia memang dinamis. Tidak terbatas masalah usaha, namun juga isu lingkungan, sosial, dan ketidakpastian regulasi. Keragaman tema ini yang membedakan antara IPOC yang diadakan GAPKI dibanding dengan *Palm Oil Congress* (POC) yang diadakan oleh Malaysia. "Kalau POC lebih fokus membahas masalah teknis dan bisnis sawit," kata Joko Supriyono, anggota Dewan Pembina GAPKI. Selain itu, IPOC disemarakkan oleh informasi tentang perkembangan terkini teknologi, produk, dan layanan di industri kelapa sawit.

Keragaman tema IPOC membuat konferensi ini dinamis. IPOC pada awalnya bernama GAPKI Conference yang diadakan pada 2004 di Bali yang dihadiri 400 orang. "GAPKI mengadakan sendiri tanpa event organizer," kata Susanto



Yang, Wakil Ketua Umum 2 GAPKI. Baru pada konferensi kedua tahun 2005 GAPKI menggunakan *event organizer*. Topik GAPKI Conference masih menggunakan bahasa Indonesia. Perubahan nama GAPKI Conference menjadi *Indonesian Palm Oil Conference* (IPOC) dimulai pada tahun ketiga yakni 2006. Sejak itu nama IPOC digunakan sampai sekarang. Tema konferensi juga berubah menggunakan bahasa Inggris.

Topik tentang keberlanjutan (*sustainability*) mulai menjadi perhatian pada IPOC selanjutnya seperti pada IPOC 2009 dan IPOC 2010 yang diadakan di Nusa Dua, Bali. IPOC 2009 dihadiri oleh 800 peserta dari berbagai negara. Jumlah peserta terus naik dan IPOC 2023 dihadiri kurang lebih 1.500 peserta dari puluhan negara.

Pelaksanaan IPOC selalu dilakukan pada akhir Oktober atau awal November setiap tahun. Penentuan waktu konferensi ini sudah dipertimbangkan dengan matang supaya tidak bersamaan dengan konferensi sawit internasional lainnya seperti POC Malaysia pada bulan Maret, Dalian Vegetable Oil Conference di China pada bulan Juni dan Globe Oil di India pada bulan September.

IPOC memiliki daya tarik kuat tidak hanya bagi peserta, namun juga pejabat negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden pertama yang membuka IPOC pada konferensi ke-9 pada tahun 2013 di Bandung. Begitu juga dengan Presiden Joko Widodo yang membuka IPOC ke-14 pada tahun 2018 di Nusa Dua, Bali. Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka IPOC di Nusa Dua, Bali pada tahun 2015. Selebihnya, IPOC dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sejak era Hatta Rajasa, Darmin Nasution, hingga Airlangga Hartarto.



Kesediaan pejabat negara tentu mempertegas bobot dan kualitas IPOC yang diselenggarakan oleh GAPKI. Apalagi kementerian terkait seperti Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Bappenas, dan lembaga pemerintah terkait berpartisipasi aktif sebagai narasumber konferensi.

Kesediaan pejabat tinggi negeri ini berpartisipasi dalam IPOC tidak lepas dari betapa penting komoditas sawit bagi Indonesia. Di sisi lain, konsistensi GAPKI menyelenggarakan konferensi ini berdampak terhadap perkembangan industri sawit nasional. "IPOC bisa menjadi arah tentang prediksi harga minyak sawit dunia," kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono. Prediksi harga CPO memang menjadi salah satu magnet dalam setiap penyelenggaraan IPOC.

IPOC secara konsisten menghadirkan para pakar dari dunia internasional untuk memberikan gambaran tentang komoditas sawit. Beberapa pakar ternama di industri ini seperti Derom Bangun (Dewan Minyak Sawit Indonesia), Thomas Mielke (Oil World), dan James Fry (LMC International), Dorab Mistry (Godrej International Ltd), Siegfried Falk (Oil World), Wang Liaowei (National Grain & Oils Information Centre) hingga Fadhil Hasan (GAPKI) secara bergantian memberikan hasil kajian dan analisisnya tentang pergerakan harga minyak sawit ke depan.

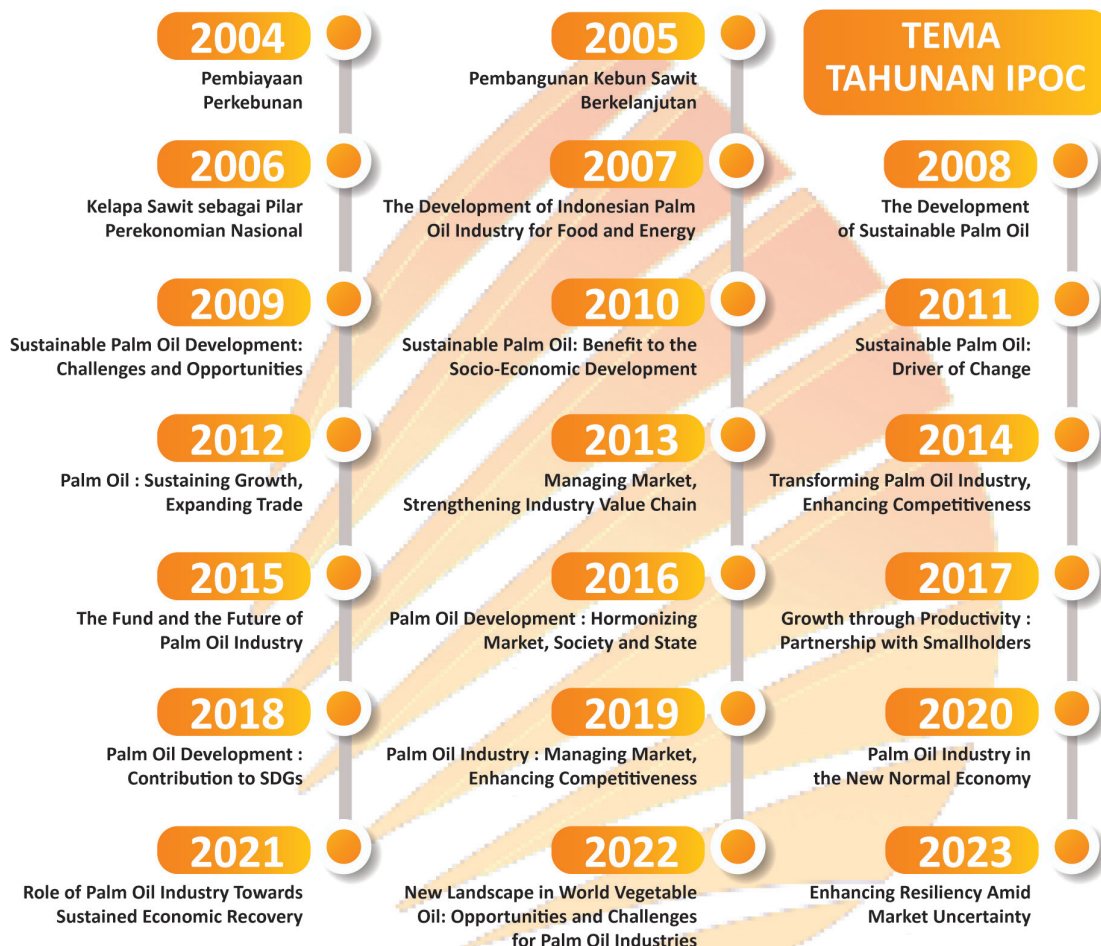
Begitu sentral pengaruh IPOC terhadap industri minyak sawit dunia, konferensi ini menjadi kebutuhan para pelaku dunia usaha. Karena itu, ketika pandemi Covid-19 menerpa dunia pada 2020 hingga awal 2022, IPOC dilaksanakan secara virtual. IPOC ke-16 merupakan IPOC pertama yang diadakan secara virtual pada 2-3 Desember 2020.

"Proyeksi harga yang disampaikan di IPOC menjadi referensi para pebisnis dunia," kata Mona Surya.

Begitu juga dengan IPOC ke-17 pada 1-2 Desember 2021 juga diselenggarakan secara virtual. "Proyeksi harga yang disampaikan di IPOC menjadi referensi para pebisnis dunia," kata Mona Surya.

Peran IPOC yang signifikan semakin dipertegas pada konferensi tahun 2022. Untuk pertama kali IPOC dihadiri pelaku industri dari perwakilan komoditas minyak nabati. IPOC ke-18 diadakan berbarengan dengan G20 Sustainable Vegetable Oils Conference (G20 SVOC). Konferensi ini diinisiasi oleh Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, CPOPC, BPDPKS, dan GAPKI.

"Biasanya setiap komoditas minyak nabati punya konferensi sendiri. Sekarang kami ajak pelaku industrinya duduk dalam satu forum yang dihadiri pula oleh negara produsen dan asosiasinya," kata Sekjen CPOPC Rizal Affandi Lukman. G20 SVOC diadakan berbarengan dengan IPOC ke-18 di Nusa Dua, Bali pada 1-3 November 2022. G20 SVOC akan menjadi platform di mana CPOPC membuka kesempatan erja sama dengan negara-negara produsen dan konsumen minyak nabati lainnya dalam penyediaan minyak nabati berkelanjutan untuk dunia. ●





GAPKI Diminta Semakin Aktif Mewujudkan Perkebunan Sawit Berkelanjutan



Pengukuhan Pengurus GAPKI periode 2023-2028 dilakukan oleh Pembina GAPKI Joko Supriyono yang disaksikan oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin.

Kesinambungan dan keberlangsungan organisasi sangat penting untuk memastikan program kerja memiliki benang merah antara satu kepengurusan dengan kepengurusan berikutnya. Dengan spirit mengawal kesinambungan organisasi, Pengurus GAPKI periode 2023-2028 yang terpilih melalui Musyawarah Nasional XI GAPKI di Bali pada 8-10 Maret 2023 akhirnya dikukuhkan. Dalam Musyawarah Nasional GAPKI XI, Eddy Martono terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum GAPKI periode 2023-2028.

Pengukuhan Pengurus GAPKI periode 2023-2028 dilakukan oleh Pembina GAPKI Joko Supriyono yang disaksikan oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Istana Wakil Presiden di Jakarta pada 12 April 2023. "Saya siap memegang amanah anggota GAPKI untuk menjalankan yang terbaik bagi organisasi," kata Eddy Martono. Amanah ini sebagai pegangan bagi kepengurusan GAPKI dalam menghadapi tantangan yang semakin berat di masa mendatang.

GAPKI akan memberikan perhatian besar pada masalah produktivitas sawit yang mulai stagnan dan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang berjalan belum sesuai harapan. "Di sinilah

peran GAPKI untuk terlibat aktif menyelesaikan berbagai masalah tadi. Kemitraan adalah salah satu solusi peningkatan produktivitas sawit," katanya. Untuk itu, hubungan dengan pemerintah akan semakin ditingkatkan sebagaimana disampaikan oleh Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin.

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang membuka Munas XI GAPKI di Bali mengatakan PSR berhubungan penting dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. "Saya minta kementerian dan lembaga terkait segera melakukan harmonisasi regulasi penyelesaian status perkebunan di kawasan hutan untuk percepatan program PSR," katanya. Harmonisasi regulasi ini menjadi bagian penting industri sawit nasional untuk menunjukkan kepada dunia tentang sustainability komoditas sawit.

Terkait dengan komitmen pemerintah mengurangi emisi karbon, Wapres mengatakan bahwa perkebunan sawit nasional seluas 16,38 juta hektar dapat berkontribusi terhadap penyerapan 2,2 miliar ton karbondioksida per tahun. Selain itu, program biodiesel berperan mengurangi emisi gas rumah kaca gas sekitar 29,5 persen. Wakil Presiden juga mendorong GAPKI semakin aktif mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan pada tahun 2024. ●



Peran Sentral GAPKI dalam Misi Bersama Indonesia-Malaysia

GAPKI terlibat aktif dalam misi bersama yang diawali dari rapat persiapan dua negara ini di Kuala Lumpur pada 22 Mei 2023.

Tantangan yang dihadapi industri sawit nasional sepanjang tahun 2023 meningkat, terutama setelah Uni Eropa menerapkan Undang-Undang Anti Deforestasi atau *European Union Deforestation Free Regulation* (EUDR) sejak 16 Mei 2023. Undang-undang ini memang tidak secara spesifik menyasar komoditas sawit karena mencakup produk lain seperti kopi, kakao, karet, kayu, daging sapi, kedelai dan turunannya. Dengan ketentuan ini, produk-produk dari Indonesia itu harus melewati uji tuntas bebas deforestasi jika ingin dijual ke Uni Eropa.

Indonesia mulai menyatakan keberatan sejak EUDR masih dalam rancangan. Apalagi setelah EUDR disahkan. “Dampak EUDR bagi Indonesia sangat besar, terutama petani” kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono. Dalam aturan EUDR, jika ditemukan minyak sawit yang berasal dari sawit yang ditanam petani setelah 31 Desember 2020, maka dinilai melanggar EUDR. Eksporternya didenda 4% dari nilai transaksi. Artinya, hanya produk yang diproduksi setelah 31 Desember 2020 di lahan yang tidak mengalami deforestasi yang diizinkan dijual di pasar Eropa.

Ketentuan EUDR juga mewajibkan petani yang punya lahan lebih dari 4 hektar untuk melakukan geolocation atau menentukan koordinat lokasi

untuk pemantauan deforestasi. Padahal petani di Indonesia diperbolehkan menanam komoditas yang diinginkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Kebijakan EUDR membuka ruang hasil pertanian tidak tertampung yang akan berdampak gejala sosial. “Ini justru menambah kemiskinan,” katanya.

Menurut Eddy Martono, sikap diskriminatif EUDR juga tampak dari sikap Uni Eropa terhadap *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) dan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Sertifikasi lahan bebas deforestasi yang menjadi mandat dalam EUDR sebenarnya telah dirumuskan dalam RSPO dan ISPO. Bahkan, RSPO pada dasarnya adalah produk yang juga dibuat oleh Uni Eropa. “Anehnya justru tidak diakui dalam EUDR,” katanya.

Saat ini, produk minyak sawit mentah (CPO) yang sudah bersertifikat ISPO sudah mencapai 24 juta ton dan yang bersertifikat RSPO 9 juta ton. Sementara ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa sebanyak 3,5 juta ton. Eropa menduduki posisi ketiga pasar ekspor minyak sawit Indonesia setelah China dan India.

Sikap diskriminatif EUDR juga tampak dari sikap Uni Eropa terhadap Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).



Selain aturan Geolocation Data yang berdampak pada petani, EUDR juga berlaku diskriminatif dengan menerapkan *country benchmarking*. Ini adalah penerapan label *high risk*, *standard*, dan *low risk* kepada sebuah negara. Artinya, negara yang dikategorikan *high risk* akan masuk daftar hitam. “Kalau mau jujur, regulasi ini sulit diterapkan petani dengan luasan lahan di atas empat hektare,” katanya. Potensi kerugian Indonesia dari penerapan EUDR mencapai USD 6,7 miliar.

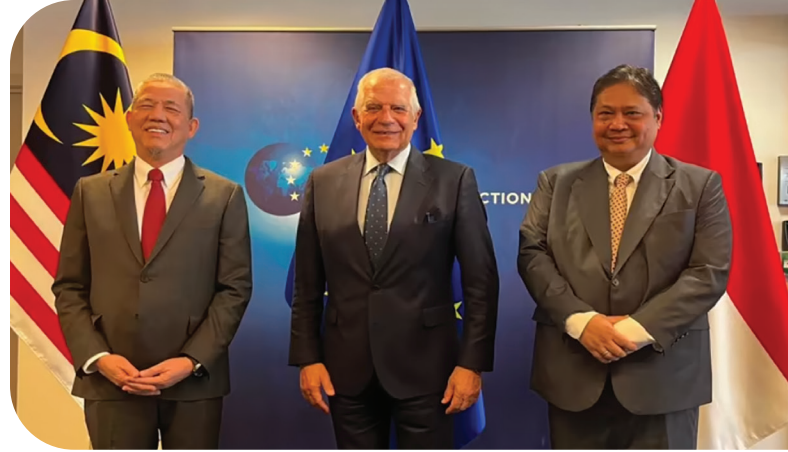
Indonesia tidak tinggal diam. Begitu juga Malaysia. Dua negara ini membentuk misi bersama (*joint mission*) untuk menyampaikan keberatan ke Uni Eropa. “Karena EUDR bentuknya undang-undang, keberatan disampaikan *government to government*,” katanya. Namun, pemerintah melibatkan dunia usaha. Di sinilah peran sentral GAPKI karena kontribusi industri sawit sangat signifikan bagi perekonomian negara. Karena itu, GAPKI menjadi mitra strategis pemerintah dalam melakukan perlawanan terhadap Uni Eropa.

GAPKI terlibat aktif dalam misi bersama yang diawali dari rapat persiapan dua negara ini di Kuala Lumpur pada 22 Mei 2023. Rapat ini menyiapkan poin yang akan disampaikan kepada pejabat kunci Uni Eropa di Brussel, Belgia. Misi bersama yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Deputy Prime Minister/Minister of Plantation and Commodities of Malaysia Dato’ Sri Haji Fadillah Bin Haji Yusof mengadakan pertemuan dengan pejabat kunci Uni Eropa di Brussels pada 30-31 Mei 2023.

“Joint mission ini untuk menyampaikan sikap Indonesia dan Malaysia melalui CPOPC terkait EUDR,” kata Ketua bidang Luar Negeri GAPKI Fadhil Hasan. Argumentasi yang dibangun joint mission menghasilkan langkah positif. Dirjen Lingkungan Komisi Eropa, Florika Fink-Hooijer mengunjungi Indonesia dan Malaysia pada 26-28 Juni 2023. Dari hasil kunjungan Eropa sepakat dengan langkah Indonesia dan Malaysia untuk membentuk *Ad Hoc Joint Task Force on EUDR* atau Satuan Tugas Bersama yang diresmikan pada 4 Agustus 2023.

Melalui Satuan Gugus Tugas ini Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa dapat melibatkan multi-stakeholder untuk menyusun implementasi regulasi dari EUDR yang tidak akan membebani dan memberatkan pelaku industri sawit dan petani kecil. GAPKI mendukung langkah pemerintah dengan harapan, paling tidak, dapat mencegah penyematan label negara berisiko tinggi (*high risk country*) pada *country benchmarking system EUDR*. “Ini untuk mendorong pemahaman bersama Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa terkait EUDR,” katanya. Selain itu, Indonesia ingin Uni Eropa dapat mengakui ISPO dan RSPO dalam EUDR.

Sejalan dengan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia, GAPKI terus berikhtiar menemukan langkah-langkah antisipatif. Salah satunya dengan mencari pasar alternatif di luar Uni Eropa. Pasar tradisional CPO Indonesia akan terus diperkuat karena ada kecenderungan peningkatan permintaan. Permintaan dari China mulai naik setelah beberapa waktu menurun. Pasar Amerika Serikat juga akan terus digarap. “Begitu juga pasar Pakistan dan Bangladesh yang cenderung



naik,” kata Eddy Martono.

Kengototan Uni Eropa menerapkan EUDR tidak lepas dari hasrat melindungi produk andalan mereka yang tidak sekompetitif minyak sawit. EUDR juga bagian dari upaya Uni Eropa menekan defisit neraca perdagangan dengan Indonesia. Dari US\$ 8,8 miliar pada 2013, defisit neraca perdagangan Uni Eropa dengan Indonesia melonjak menjadi US\$ 21,4 miliar pada 2022. “EUDR menjadi salah satu *bargaining chip* (strategi untuk memenangkan perundingan) UE untuk negosiasi perdagangan dengan Indonesia,” kata hasil kajian LPEM Universitas Indonesia.

Data Oils World juga menunjukkan fakta menarik. Total lahan sawit di seluruh dunia hanya 24,259 juta hektar. Sedangkan *rapeseed* 36,503 juta hektar, *sun flower* 30,072 juta hektar, *cotton seed* 33,080 juta hektar, dan *soybeen* 132,813 juta hektar. Artinya, total lahan sawit hanya 1/5 dari lahan yang dipakai untuk *soybeen* dan di bawah minyak nabati nonsawit. Laju deforestasi di Indonesia juga menurun drastis. Lantas, kenapa komoditas yang tumbuh di Eropa tidak diributkan? ●



Yakinkan Manfaat Sawit, Indonesia-Malaysia GENCARKAN PROMOSI DI INDIA

Indonesia dan Malaysia ditantang untuk lebih gencar mempromosikan manfaat minyak sawit karena masih terjadi kesalahpahaman di masyarakat India.

Sejak Uni Eropa mengesahkan Undang-Undang Anti Deforestasi atau *The EU Deforestation-free Regulation* (EUDR) pada 16 Mei 2023, Indonesia menempuh berbagai langkah sebagai antisipasi terhadap dampak kebijakan yang merugikan tersebut. Selain melakukan perlawanan bersama sesama negara produsen minyak sawit lainnya, Indonesia menjajaki peluang pasar lain melalui promosi manfaat minyak sawit. Karena itu, Indonesia berpartisipasi aktif dalam *The Second Sustainable Vegetable Oils Conference* (SVOC) di Mumbai, India pada 27 September 2023.

Konferensi yang diselenggarakan oleh The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) ini dihadiri oleh Sekjen Kementerian Perkebunan dan Komoditas Datuk Haji Mad Zaidi Mohd Karli, Wakil Menteri Perdagangan RI, Jerry Sambuaga, dan Managing Director Solidaridad Asia, Shatadru Chattopadhyay. Di forum ini GAPKI diwakili oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dan Ketua Bidang Luar Negeri M. Hadhil Hasan. Topik yang dibahas antara lain posisi minyak nabati berkelanjutan di pasar global, dan membangun ketahanan di tengah ketidakpastian.



Sekjek CPOPC Rizal Affandi Lukman mengatakan pihaknya memfasilitasi misi bersama Indonesia dan Malaysia ke India guna meyakinkan India bahwa produk CPO Indonesia dan Malaysia telah memenuhi sertifikasi keberlanjutan. "India salah satu negara tujuan ekspor CPO terbesar. Tapi, persepsi negatif tentang sawit semakin besar khususnya di kelas menengah," kata Rizal. Pasar India penting karena konsumsi minyak makan di India mencapai 23,87 juta ton per tahun dan menjadi pasar penting untuk Indonesia. ●



Populasi India mencapai 1,4 miliar jiwa dan bertambah 18 juta per tahun.

Menurut Wakil Menteri Perdagangan RI, Jerry Sambuaga, pada tahun 2022 ekspor minyak sawit Indonesia ke India mencapai 5,5 juta ton dengan nilai US\$ 5,6 miliar. India mitra dagang sangat penting dan strategis bagi Indonesia. Minyak sawit memberikan manfaat untuk kedua negara. Karena itu, promosi manfaat minyak sawit harus terus dilakukan, terutama untuk merespon kampanye negatif sawit oleh negara barat. "Ini yang harus kita hapus, lenyapkan. Kita tidak akan kita toleransi," katanya.

Tentang promosi sawit, Sekjen Kementerian Pertanian dan Komoditas Malaysia, Datuk Haji Mad Zaidi Mohd Karli menyatakan Malaysia membentuk

badan khusus untuk promosi sawit yakni Malaysian Palm Oil Council (MPOC).

Aspek yang dipromosikan terutama tentang keamanan, efisiensi, dan manfaat minyak sawit. "Kami promosi minyak sawit dalam kartun Upin-Ipin. Ada episode yang membahas manfaat positifnya," kata Mad Zaidi Mohd Karli.

Di konferensi ini, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono memaparkan trend ekspor CPO Indonesia ke India dari tahun ke tahun. Penurunan terjadi sejak 2019 yang mencapai 6,9 juta ton. Upaya peningkatan ekspor terus dilakukan di tengah peningkatan ongkos produksi, volume produksi yang stagnan, dan hambatan di sejumlah negara. ●



Minyak sawit masih menjadi sumber utama kebutuhan minyak makan India dengan porsi 33 persen.

Minyak sawit masih menjadi sumber utama kebutuhan minyak makan India dengan porsi 33 persen. Sedangkan minyak kedelai 24 persen, minyak mustar 16 persen, minyak bunga matahari 8 persen, dan sisanya minyak makan dari sumber lain. Minyak sawit dikonsumsi kelas menengah ke bawah, rumah makan, hotel, restoran, dan catering. Dengan menasar kelas menengah, potensi peningkatan konsumsi minyak sawit di India sangat besar.

Direktur Eksekutif Asosiasi Ekstraktor Pelarut India BV Mahta mengatakan ketersediaan dan harga minyak makan menjadi isu ketahanan pangan yang sangat penting bagi India. Populasi India mencapai 1,4 miliar jiwa dan bertambah 18 juta per tahun. Konsumsi minyak makan per kapita naik dari saat ini 17 kg menjadi 21,15 kg pada 2030. Konsumsi minyak makan India per tahun pun menjadi menjadi 30,27 juta ton.

Untuk memenuhi kebutuhan minyak makan, India mulai menanam kelapa sawit. Pemerintah India mencanangkan satu juta hektar kebun sawit dan ditargetkan menjadi 2,8 juta hektar pada 2030. Saat ini produksi CPO India masih sekitar 329.150 ton per tahun. India juga telah sepakat dengan Indonesia dan Malaysia berkolaborasi bersama di bawah Solidaridad Asia, mitra resmi pemerintah India.

"Kami promosikan manfaat sawit berkelanjutan sejak 2019," kata Shatadru Chattopadhyay, Managing Director Solidaridad Asia.

Indonesia dan Malaysia ditantang untuk lebih gencar mempromosikan manfaat minyak sawit karena masih terjadi kesalahpahaman di masyarakat India. Padahal India merupakan salah satu pasar penting bagi dua negara produsen minyak sawit ini. Besarnya pasar India perlu menjadi pertimbangan Malaysia dan Indonesia untuk dieksploitasi besar-besaran agar minyak sawit bisa menjadi pilihan utama masyarakat India. ●





Indonesian Night, Promosi Minyak Sawit di Uzbekistan

“Lokasi Uzbekistan sangat strategis karena bisa menjadi penghubung dengan negara-negara di sekitar,” kata Eddy Martono.

Namanya lagman. Sup daging dan sayur yang dipadukan dengan pasta. Ini kudapan favorit etnis Uzbek, etnis mayoritas warga Uzbekistan. Lagman jadi makin gurih ketika diolah menggunakan minyak sawit. “Semakin menggugah selera,” kata Chef Khamdun, seorang diaspora Indonesia di Uzbekistan yang demo masak di Indonesian Night di Magic Park, Tashkent, Uzbekistan pada 16 September 2023. Sebanyak 300 hidangan habis diserbu pengunjung. Pun bakwan sayur, pisang goreng, dan gorengan ala Indonesia yang dihadirkan di Indonesian Night.

Indonesian Night di Tashkent ini digagas oleh GAPKI dan Kedubes RI di Uzbekistan. Tujuannya kampanye positif dan manfaat minyak sawit bagi kesehatan. “Layaknya minyak nabati lainnya, minyak kelapa sawit aman dan bahkan sehat untuk dikonsumsi,” kata Wakil Sekjen GAPKI Lolita Bangun di Tashkent. Promosi minyak sawit lewat kuliner ini direspon positif warga Uzbekistan. Apalagi olahan makanan dengan minyak sawit terbukti semakin lezat. Citra rasa asli juga tidak berubah. Aromanya kelezatan makanan juga lebih terasa.

Malam Indonesia adalah rangkaian dari promosi minyak sawit di Asia Selatan. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Uzyogmoysanoat, Asosiasi Perusahaan Industri Minyak dan Lemak Republik Uzbekistan terkait kerjasama di sektor minyak sawit yang dilakukan di Tashkent pada 14 September 2023. Penandatanganan



MoU ini disaksikan oleh Dubes RI di Uzbekistan, HE Surnaryo Kartadinata bertepatan dengan partisipasi Indonesia di Asia Grains and Oils Conference 2023. Sebelumnya dua negara menyepakati perjanjian kerjasama bilateral di sektor sawit. “Lokasi Uzbekistan sangat strategis karena bisa menjadi penghubung dengan negara-negara di sekitar,” kata Eddy Martono. Adapun Ketua Uzyogmoysanoat, Oybek Zuparov mengatakan pihaknya ingin belajar pengembangan dari Indonesia tentang industri dan pengolahan minyak sawit. Berdasarkan data KBRI Tashkent, Uzbekistan membutuhkan 60-70 ribu ton CPO per tahun.

Dubes RI di Uzbekistan HE Sunaryo mengatakan Uzbekistan mempunyai potensi menjadi pusat produksi dan pengelolaan minyak nabati regional karena menjadi salah satu produsen dan pengguna minyak nabati terkemuka di Asia Tengah. Kemitraan Indonesia dan Uzbekistan adalah bukti komitmen kedua negara bekerjasama di sektor minyak kelapa sawit. ●



Bursa CPO dari Mandatory Menjadi Voluntary



Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan tidak ada paksaan kepada pengusaha untuk bergabung ke Bursa CPO.

Kementerian Perdagangan akhirnya meresmikan Bursa CPO Indonesia pada 13 Oktober 2023. Perdagangan di bursa yang diharapkan menghasilkan harga acuan (*price reference*) komoditas minyak sawit ini bersifat sukarela (*voluntary*), bukan wajib (*mandatory*). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan tidak ada paksaan kepada pengusaha untuk bergabung ke Bursa CPO. Sebab, perdagangan di bursa ini dilakukan secara *voluntary* atau sukarela.

"Bagus kalau bukan *mandatory*, sesuai mekanisme pasar. Kalau bursa murni mekanisme pasar sangat bagus," kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono. Kementerian Perdagangan menunjuk Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Group sebagai penyelenggara bursa CPO. Sebanyak 18 perusahaan bergabung sejak peluncuran bursa. Perdagangan perdana dimulai 20 Oktober 2023, lebih cepat tiga hari dari target semula Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yakni 23 Oktober 2023.

Konsep Bursa CPO ini telah melewati proses panjang dan beberapa perubahan sejak April 2023. Semula perdagangan di Bursa CPO bersifat

mandatory bagi eksportir karena dikaitkan dengan persetujuan ekspor dan DMO. Produk yang ditransaksikan hanya CPO berkode HS 15.111.000 yang diekspor. Untuk itu, transaksi di bursa dikenai biaya tambahan. Dengan demikian, beban untuk pelaku usaha bertambah yakni bea keluar, pengutan ekspor dan DMO.

Rancangan awal Bursa CPO itu dipaparkan Bappebti kepada publik sejak Mei 2023 karena bursa ditargetkan beroperasi pada Juni 2023. Bappebti juga mengajak dunia usaha berdialog dengan harapan memberi masukan dan menyampaikan aspirasinya. Berdasarkan masukan dunia usaha, pemerintah mengakomodasi aspirasi pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sejalan dengan persiapan aturan main bursa, beberapa pihak mengajukan diri sebagai penyelenggara bursa.

Bursa CPO Indonesia akhirnya diresmikan pada 13 Oktober 2023 setelah dua kali tertunda dari target awal yakni Juni 2023 dan Agustus 2023. Perdagangan CPO melalui ICDX ini berlaku untuk pasar domestik. Dari di bursa ini diharapkan terbentuk harga acuan yang bisa digunakan untuk beberapa kepentingan termasuk acuan penetapan pajak. "Evaluasi perdagangan di bursa terus menerus tiga bulanan," kata Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko saat peresmian Bursa CPO.

Didid menegaskan apabila perdagangan di bursa sedikit, maka sulit mendapatkan harga acuan. Karena itu, dia menyarankan pelaku usaha yang memiliki *long term contract* untuk bertransaksi di bursa setelah kontrak selesai. "Bisa dilakukan secara bertahap," katanya. Didid mengatakan transaksi di bursa yang bersifat *mandatory* memang di-*hold*. "Kami mencoba dulu *voluntary* ini agar referensi harga terbentuk lebih dulu," katanya. Karena itu, partisipasi pelaku usaha akan menentukan apakah Bursa CPO nantinya tetap *voluntary* atau *mandatory*. ●





Komitmen GAPKI: Menghapus Pekerja Anak dan Melindungi Pekerja Perempuan

"GAPKI telah melakukan sejumlah inisiatif untuk mempromosikan sawit berkelanjutan melalui praktek ketenagakerjaan yang bertanggungjawab."

GAPKI terus menunjukkan eksistensi dan kontribusinya dalam memerangi pekerja anak di perkebunan kelapa sawit melalui beragam kegiatan. Sebagai bagian dari *Partnership for Action Against Child Labour in Agriculture (PAACLA)* Indonesia, GAPKI berpartisipasi dalam peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak (HDMPA) yang jatuh pada 12 Juni 2023. Peringatan ini dimulai dengan mengadakan *Fun Walk* di *Car Free Day (CFD)* Jakarta pada 11 Juni 2023 yang diikuti oleh 150 orang. GAPKI diwakili oleh Marja Yulianti dari Kompartemen Pekerja Perempuan dan Perlindungan Anak GAPKI.

Kegiatan *Fun Walk* dikoordinir oleh Jaringan LSM untuk Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemnaker, dan Bappenas. Beberapa tokoh yang mengikuti *Fun Walk* ini antara lain Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Ciput Eka Purwianti, Direktur Ketenagakerjaan Bappenas Mahatmi Saronto, Direktur JARAK Maria Andi Akbar, serta Kepala Seknas PAACLA Maria Clara Bastini. Tema utama yang diangkat dalam HDMPA 2023 adalah *Keadilan Sosial Bagi Semua, Akhiri Pekerja Anak*.

Dalam peringatan HDMPA 2023, pemerintah menyatukan langkah bersama pengusaha perkebunan untuk menghapus pekerja anak. Menteri Tenaga Kerja Iza Fauziah mencanangkan Perkebunan Kelapa Sawit Terbebas Dari Pekerja Anak Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Bebas Pekerja Anak yang dilakukan secara *hybrid* dari Hotel Pangeran Pekanbaru pada 12 Juni

2023. Penganjangan perkebunan sawit bebas pekerja anak ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, perusahaan, aktivis anak, ormas sipil, serikat buruh, LSM, dan asosiasi pengusaha.

Rangkaian peringatan HDMPA 2023 dilanjutkan dengan *Minggu Ceria* di Taman Ecopark Tebet, Jakarta Selatan pada 18 Juni 2023. Sebanyak 200 peserta dari mitra PAACLA hadir sebagai bentuk dukungan. Dalam *Minggu Ceria* ini, GAPKI diwakili oleh Ketua Bidang Pengembangan SDM, Sumarjono Saragih. "GAPKI berkomitmen penuh mendukung penghapusan pekerja anak," kata Sumarjono Saragih.

Salah satu langkah GAPKI adalah menerbitkan buku *Panduan Praktis dan Praktik Baik, Sawit Indonesia Ramah Anak*. Buku ini berisi panduan praktis praktik baik yang dikembangkan oleh perusahaan sawit dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Sumarjono menegaskan perusahaan anggota GAPKI tunduk pada regulasi yang melarang pekerja anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ketua Bidang Pengembangan SDM GAPKI Sumarjono Saragih menegaskan perkebunan sawit menjamin dan melindungi pekerja perempuan secara maksimal.

Selain berperan aktif dalam penghapusan pekerja anak, GAPKI juga aktif dalam perlindungan pekerja perempuan melalui berbagai forum. Salah satunya GAPKI dan BDPKS mengadakan *Sosialisasi dan Workshop Perlindungan Pekerja Perempuan Perkebunan Kelapa Sawit* di



**STOP
PEKERJA
ANAK**





Riau pada 7-9 September 2023 dan di Kalimantan Selatan pada 5-6 Oktober 2023. Acara di Riau diikuti 100 orang, 50 orang di antaranya dari instansi pemerintah dan sisanya perwakilan perusahaan sawit.

Ketua Bidang Pengembangan SDM GAPKI Sumarjono Saragih menegaskan perkebunan sawit menjamin dan melindungi pekerja perempuan secara maksimal. Salah satu wujudnya adalah memberikan beberapa keringanan kepada pekerja perempuan sesuai pasal 76 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "GAPKI dan BPDPS memastikan bahwa industri sawit nasional sangat ramah terhadap pekerja perempuan," katanya.

Untuk sosialisasi perlindungan pekerja perempuan, GAPKI telah menerbitkan buku *Panduan Praktis Perlindungan Pekerja Perempuan*

di Perkebunan Sawit pada 2021. Pekerja perempuan sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Karakter perempuan yang teliti dibutuhkan untuk area kerja di perkebunan sawit. "Karena itu, kami memberikan perhatian khusus pada mereka," kata Ahmad Maulizal, Kepala Divisi Perusahaan BPDPS.

Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor mendukung langkah BPDPS dan GAPKI dalam perlindungan pekerja perempuan ini. Gubernur menyatakan belum ada kejadian di daerahnya yang merugikan pekerja perempuan.

Ketua GAPKI Kalimantan Selatan, Edy S Binti mengatakan saat ini ada 86 perusahaan sawit di daerahnya. Sebanyak 53 perusahaan bergabung dengan GAPKI. Total pekerja di perkebunan sawit 68.528 orang yang terdiri dari lelaki 52.081 orang dan 16.447 perempuan. ●





Menanam Mangrove, Melestarikan Lingkungan

"Kami juga membangun pondok pembibitan mangrove di lokasi program untuk mendukung keberhasilan penanaman," kata Agam Fatchurrochman.

Komitmen GAPKI dalam merawat dan melestarikan lingkungan dilakukan melalui berbagai aktivitas, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan tanaman sawit. Salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan diwujudkan melalui penanaman mangrove di Desa Sebuai, Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. "Ini komitmen GAPKI dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove dan upaya untuk mitigasi perubahan iklim," kata Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono.

Penanaman mangrove pada 24 Juni 2023 ini adalah hasil kerjasama GAPKI dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kelompok Mangrove Talok Desa Sebuai. Program ini merupakan yang kedua setelah pada 2021-2022 GAPKI sukses menanam 33 ribu bibit mangrove dengan tingkat hidup mencapai 90%. Bibit mangrove ditanam di lahan seluas 10 hektar dengan jarak tanam 1 m, jarak antar lajur 4 m dan SPH 2.500-3.300 per hektar. Jenis bibit yang ditanam 31.350 bakau dan 1.650 bibit semai mangrove.

Ketua Bidang Kampanye Positif GAPKI, Agam Fatchurrochman mengatakan penanaman bakau pada



24 Juni 2023 dilakukan di lahan lebih luas yakni 20 hektar. Lokasinya bersebelahan dengan lokasi penanaman tahap pertama. Sesi pertama penanaman dimulai pada Juli 2023. Tanaman ini menjalani proses pemeliharaan selama tiga bulan, mulai Juli hingga November 2023. Total bibit bakau yang ditanam mencapai 26.400 bibit yang terdiri dari jenis api-api (*Avicennia*) 2.640 batang, bakau (*Rhizophora*) 21.120 batang dan perepat pedada (*Sonneratia*) 2.640 batang.

"Kami juga membangun pondok pembibitan mangrove di lokasi program untuk mendukung keberhasilan penanaman," kata Agam Fatchurrochman. Program ini mendapatkan apresiasi dari Pj Bupati Kotawaringin Barat, Budi Santosa. "Yang dilakukan GAPKI sangat luar biasa. Ini menjadi contoh untuk yang lain," katanya. Apresiasi yang sama disampaikan oleh Koordinator Pengendalian Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan Kemenko Marves, Fatma Puspitasari.

Dampak penanaman mangrove tahap pertama sudah dirasakan oleh masyarakat yang makin mudah mendapatkan hasil tangkapan laut. Masyarakat lebih mudah mendapatkan kepiting karena ekosistem biota terbentuk dengan kehadiran pohon bakau. ●





GAPKI Implementasikan PSR Jalur Kemitraan



PSR kemitraan cukup strategis untuk transfer pengetahuan, keahlian dan teknologi dari para pelaku industri.

GAPKI merespon positif terbitnya Peraturan Pertanian Nomor 3 Tahun 2022 yang memberikan ruang bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit berpartisipasi dalam percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). “Kami mengapresiasi peraturan ini karena membuka peluang pengusaha melakukan pendampingan kepada petani binaan dalam program PSR kemitraan,” kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dalam Kick Off Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kemitraan Anggota GAPKI di Kabupaten Kampar, Riau pada 18 September 2023.

Program PSR menysasar 2,8 juta hektar dari 6,94 juta hektar lahan sawit milik petani karena sudah tua. Target tanaman yang diremajakan seluas 180 hektar per tahun. Apabila target ini tidak terpenuhi, dampaknya sangat besar bagi produksi minyak sawit nasional. Dalam 5 tahun terakhir, produksi sawit stagnan, bahkan cenderung menurun. Padahal konsumsi minyak sawit dalam negeri terus naik dari 18 juta ton menjadi 21 juta ton pada 2022. “Dalam hal ini, kebun petani plasma maupun swadaya bagian penting industri sawit nasional,” katanya.

Berdasarkan data terkini, terdapat 513 ribu hektar kebun sawit plasma di 15 provinsi. Sebagian di antaranya adalah petani binaan anggota GAPKI yang memerlukan peremajaan. “Petani sawit ini membutuhkan pendampingan dari pemerintah dan pengusaha supaya program PSR dapat terimplementasi dengan baik,” katanya. Pendampingan untuk petani binaan anggota GAPKI diharapkan mempercepat kesempatan mereka menjalankan program PSR.

Program PSR dimotori oleh Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan

Kelapa Sawit (BPDKS) sejak 2017. Petani sawit mendapatkan bantuan Rp 30 juta rupiah per hektar untuk peremajaan tanaman berusia di atas 25 tahun. “Hingga saat ini sudah Rp 8,8 triliun disalurkan untuk program PSR,” kata Direktur Utama BPDKS Eddy Abdurrachman.

Dirjen Perkebunan Kementan Andi Nur Alam Syah mengapresiasi dan berterima kasih kepada GAPKI yang mendorong akselerasi PSR melalui jalur kemitraan. PSR kemitraan cukup strategis untuk transfer pengetahuan, keahlian dan teknologi dari para pelaku industri. “Kami yakin kolaborasi ini dapat mengakselerasi program dan meningkatkan produktivitas serta keuntungan bagi para petani,” kata Andi Nur Alam Syah. ●





Komitmen dan Kolaborasi GAPKI CEGAH KARHUTLA



“Apel siaga ini bentuk komitmen GAPKI mulai pencegahan hingga pemadaman apabila terjadi kebakaran lahan,” kata Wakil Ketua Umum III GAPKI Satrija Satrija Budi Wibawa dalam Apel Bersama Pencegahan Karhutla.

Sejak Badan Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengumumkan musim kemarau 2023 datang lebih cepat dan terjadinya El Nino pada Agustus 2023, GAPKI bersegera mengambil langkah antisipatif. GAPKI mengirim surat himbauan tertanggal 2 Mei 2023 yang ditandatangani Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dan Sekjen GAPKI M. Hadi Sugeng. Surat himbauan berisi 9 poin itu berfokus pada antisipasi dan kesiapsiagaan anggota GAPKI menghadapi kebakaran lahan.

Salah satu isi himbauan adalah menjalankan pedoman pencegahan dan pengendalian karhutla yang diterbitkan sejak April 2020. Anggota GAPKI juga diminta mengaktifkan Satgas Karhutla di setiap perusahaan. Satgas efektif mengawasi serta mengendalikan kebakaran lahan karena bekerja 24 jam memantau titik api, termasuk di lahan masyarakat sekitar kebun. Masyarakat yang membuka lahan

dengan cara membakar lahan diminta berkoordinasi dengan aparat pemerintah dan Satgas Karhutla membantu pengawasan api di lahan yang dibakar.

Sebagai tindak lanjutnya, GAPKI mengadakan Apel Bersama Pencegahan Karhutla di kawasan perkebunan PT Tri Buana Mas, anak perusahaan PT Astra Agro Lestari Tbk di Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan pada 26 Agustus 2023. “Apel siaga ini bentuk komitmen GAPKI mulai pencegahan hingga pemadaman apabila terjadi kebakaran lahan,” kata Wakil Ketua Umum III GAPKI Satrija Satrija Budi Wibawa dalam Apel Bersama Pencegahan Karhutla.

Direktur PT Astra Agro Lestari, Tbk Rudjito Purnomo mengatakan PT TBM berkolaborasi dengan Pemkab Tapin, Kapolres, BPBD Kalsel dan Kabupaten Tapin hingga masyarakat. “Kita belajar dari karhutla 2015 dan 2018 sehingga lebih proaktif mengantisipasinya,” katanya. Masyarakat yang dilibatkan adalah yang berada dalam radius 3 km dari perkebunan sawit.

Ketua GAPKI Kalimantan Selatan, Edy Sapta Binti mengatakan pihaknya memiliki MoU dengan Polda Kalimantan Selatan menjaga konsesi dari kebakaran lahan. Ini komitmen dan kepedulian pengusaha perkebunan sawit terhadap pencegahan kebakaran lahan,” katanya. Cakupan area yang dimasukan nota kesepahaman ini ternasuk juga perkebunan rakyat.



Selain Apel Siaga, GAPKI Kalimantan Tengah juga memanfaatkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) bersama Pemprovi Kalimantan Tengah.

Dalam apel siaga ini, Wakil Ketua Umum III GAPKI Satrija Budi Wibawa menegaskan kebakaran lahan tidak identik dengan kebun sawit. Kebakaran lahan juga bukan domain dan tanggung jawab GAPKI. Sebab, hanya 25% dari seluruh perusahaan sawit di Indonesia yang bergabung dengan GAPKI. "Tapi, GAPKI berkomitmen mencegah karhutla," katanya.

Selain Apel Siaga, GAPKI Kalimantan Tengah juga memanfaatkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) bersama Pemprovi Kalimantan Tengah. TMC bagian dari strategi nasional memitigasi dan menanggulangi karhutla sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2020. TMC melibatkan BRIN, BMKG, Kementerian LHK, GAPKI dan pemangku kepentingan setempat.

Ketua Bidang Lingkungan dan ISPO GAPKI Kalimantan Tengah, Sutto Suwahyo mengatakan penggunaan TMC berlangsung selama enam hari yakni, 25-30 Agustus 2023. Sasarannya adalah seluruh area di Kalimantan Tengah yang memiliki tingkat kelembapan paling rendah atau sangat kering. "Berdasarkan data BRIN ditemukan 60 hotspot di beberapa titik di Kalimantan Tengah," kata Sutto Suwahyo.

Menurut Koordinator Lapangan TMC Kalimantan Tengah, Chandra Fadlillah, secara historis, curah



Kebakaran lahan juga bukan domain dan bukan tanggung jawab GAPKI. "Tapi, GAPKI berkomitmen bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan," katanya.

hujan di wilayah Kalimantan Tengah pada 23-24 Agustus 2023 menunjukkan penurunan dibanding rata-rata historisnya. Hal ini menunjukkan El Nino sangat besarnya pengaruhnya di Kalimantan Tengah. TMC diharapkan tidak hanya meminimalisir hotspot tapi menghilangkan *hotspot* agar Kalimantan Tengah menjadi *zero hotspot area*. "TMC adalah solusi permanen untuk karhutla," katanya. ●





Ini Lima Rekomendasi Andalas Forum IV Tahun 2023

Andalas Forum IV mengangkat tema utama Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Hilirisasi dan Korporatisasi Petani.

Beberapa isu strategis industri sawit seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS), hingga pemetaan digital RTRW industri sawit menjadi salah satu fokus perhatian Andalas Forum IV 2023 yang berlangsung di Hotel Hermes, Banda Aceh pada 19-20 Oktober 2023. Forum dialog yang diselenggarakan oleh GAKPI Aceh dan GAKPI Sumatera Utara ini menghasilkan rumusan dan rekomendasi bagi keberlangsungan bisnis dan investasi di sektor perkebunan dan industri sawit nasional.

“Keberhasilan Andalas Forum IV 2023 karena dukungan semua pemangku kepentingan industri sawit,” kata Ketua GAKPI Aceh, Denny Ramadhan.

Andalas Forum IV mengangkat tema utama *Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Hilirisasi dan Korporatisasi Petani*. Tema ini menjadi fokus dialog untuk menyatakan pentingnya upaya bersama dan bermitra dalam memajukan industri kelapa sawit serta meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

Andalas Forum IV menghadirkan 14 narasumber. Sebanyak empat narasumber untuk sesi PSR, dua narasumber di sesi Penetapan Harga TBS dalam Perspektif Kemitraan, dan tiga narasumber di sesi Dinamika Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan. Sedangkan sesi Digitasi

terkait Kebijakan RTRW dalam Industri Kelapa Sawit menghadirkan lima narasumber.

Sebanyak 400 orang hadir yang mewakili perwakilan GAPKI dari seluruh Indonesia, perkebunan sawit non-anggota GAPKI, asosiasi petani, pemerintah, akademisi dan mahasiswa, serta para pemangku kepentingan. Sekjen GAPKI Aceh, Yantri Bakti Putera mengatakan Andalas Forum IV menghasilkan 10 rumusan dan 5 rekomendasi untuk mendorong keberlanjutan industri sawit nasional. ♦

LIMA REKOMENDASI ANDALAS FORUM IV

1

Kolaborasi dan Kemitraan yang Kuat: Mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, industri, dan petani dalam implementasi program PSR dan pengembangan sarana prasarana yang diperlukan.

2

Transparansi dan Keadilan Harga TBS: Menerapkan regulasi yang transparan dan jelas dalam penetapan harga TBS, serta memastikan bahwa harga yang ditetapkan adil dan sesuai dengan kontribusi petani.

3

Keberlanjutan dan Pendidikan Tinggi: Mendukung kerjasama antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam melatih dan mempersiapkan SDM yang berkualitas tinggi dengan komitmen pada praktik kultur teknis terbaik dan berkelanjutan.

4

Pemetaan Digital dan Tata Ruang yang Terintegrasi: Memastikan pemetaan digital terintegrasi dalam kebijakan RTRW untuk optimalisasi penggunaan lahan dan dukungan terhadap program peremajaan sawit rakyat.

5

Penyelesaian Konflik Lahan yang Adil: Aktif menyelesaikan konflik lahan antara industri perkebunan kelapa sawit dan kawasan hutan dengan cara yang adil, melindungi keanekaragaman hayati, dan hak-hak masyarakat setempat.



Ketua Umum GAPKI

Lantik Ketua GAPKI Sumatera Utara



Ketua Umum GAPKI Eddy Martono melantik pengurus GAPKI Cabang Sumatera Utara periode 2023-2028 di Aula Tengku Rizal Nurdin atau Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara di Jalan Jenderal Sudirman No. 41 Medan. Kepengurusan terbaru GAPKI Sumatera Utara dipimpin oleh Timbas Prasad Ginting yang terpilih sebagai Ketua GAPKI Sumatera Utara secara aklamasi pada Musyawarah Cabang V GAPKI Sumatera Utara di Hotel Santikan Medan pada 12 Juni 2023. Pembukaan Muscab V ini juga dihadiri oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono.

“Pelantikan di rumah dinas gubernur ini layak ditiru oleh GAPKI cabang lain,” kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono. Selain menjadi simbol kemitraan strategis antara pemerintah dan GAPKI, pemilihan rumah dinas kepala daerah bisa menjadi warna baru GAPKI. Pelantikan ini dihadiri Gubernur Sumatera Utara Eddy Rahmayadi dan beberapa pejabat daerah di Sumatera Utara.

“Pelantikan di rumah dinas gubernur ini layak ditiru oleh GAPKI cabang lain,” kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono.

Gubernur Eddy Rahmayadi meminta kolaborasi antara pemerintah daerah dan pengusaha sawit ditingkatkan untuk memberikan dampak

kesejahteraan kepada masyarakat. “Janganlah masing-masing jalan sendiri,” katanya.

Sebagai sentra penghasil sawit, seharusnya daerah ini lebih merasakan manfaat perkebunan sawit. Secara khusus, gubernur meminta GAPKI untuk dapat mendorong percepatan perbaikan infrastruktur di Sumatera Utara.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan tantangan GAPKI cukup besar. Salah satunya belum semua perusahaan sawit bergabung dengan GAPKI.

Dari 3.000 lebih perusahaan sawit di Indonesia, baru 727 perusahaan yang menjadi anggota GAPKI. Di Sumatera Utara, anggota GAPKI ada 90 perusahaan dengan luas lahan sekitar 500 ribu hektar. Di provinsi ini ada 100 lebih perusahaan sawit dengan lahan mencapai 2 juta hektar.

Ketua GAPKI Sumatera Utara Timbas Prasad Ginting menyatakan siap mengemban amanah. Sinergi yang kuat dengan GAPKI Pusat akan mempermudah pelaksanaan program kerja. “Kita siap memperkuat sinergi dengan GAPKI Pusat,” katanya. Sebelum terpilih sebagai ketua, Timbas Prasad adalah Sekretaris GAPKI Cabang Sumatera Utara periode 2018-2023.

Timbas Prasad didampingi tiga wakil ketua yakni Mino Lesmana, Tamauli Ginting dan David Huang. Sedangkan Syahril Pane sebagai sekretaris dan Sugi Hartana sebagai bendahara. ●



Syaiful Panigoro

Regenerasi dalam sebuah organisasi menjadi kebutuhan untuk mendorong perkembangan organisasi agar mampu beradaptasi dengan perubahan. Berangkat dari program regenerasi dan kesinambungan organisasi, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah mengadakan Musyawarah Cabang V GAPKI Kalimantan Tengah di Swiss-Belhotel Palangkaraya pada 15 Juni 2023. Selain untuk merancang program kerja lima tahun ke depan, Muscab V juga untuk mencari figur yang akan memimpin GAPKI Cabang Kalimantan Tengah periode 2023-2028.

Pembukaan Muscab V GAPKI Kalimantan Tengah ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo yang didampingi oleh Ketua Umum GAPKI Pusat Eddy Martono, Sekjen GAPKI Pusat M. Hadi Sugeng, dan Plt. Ketua Cabang GAPKI Kalimantan Tengah Au Rizky Djaya D. Musyawarah cabang ini mengangkat tema *GAPKI Siap Bersinergi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Melalui Pola Kemitraan Menuju Kalteng Berkah*.

Dalam musyawarah cabang ini, Syaiful Panigoro terpilih secara aklamasi sebagai Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Tengah periode 2023-2028. Sebagai nakhoda baru wadah para pengusaha perkebunan sawit ini, Syaiful Panigoro menyatakan siap bersinergi dalam mewujudkan tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan

Nakhoda Baru GAPKI Kalimantan Tengah

melalui pola kemitraan. “Saya siap memegang amanah GAPKI untuk menjalankan yang terbaik bagi organisasi,” katanya. Syaiful Panigoro merupakan figur yang sudah dikenal di industri sawit melalui kelompok usaha Medco Agro.

GAPKI Siap Bersinergi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Melalui Pola Kemitraan Menuju Kalteng Berkah.

Pelantikan pengurus GAPKI Cabang Kalimantan Tengah periode 2023-2028 dilakukan di Hotel Mercure Pangkalan Bun pada 29 Agustus 2023 oleh Ketua Umum GAPKI Pusat Eddy Martono. Kepengurusan baru ini didukung oleh 82 orang pengurus yang berasal dari perusahaan sawit anggota GAPKI yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Tengah. “GAPKI cabang adalah mitra pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat,” kata Ketua Umum GAPKI Pusat Eddy Martono.

Kepengurusan baru ini diharapkan semakin memperkuat posisi GAPKI sebagai mitra strategis pemerintah tidak hanya untuk mendatangkan investasi, namun juga pertumbuhan ekonomi daerah dan negara. “Kami mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus baru dan marilah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk kebaikan bersama,” katanya. ●



GAPKI Sulawesi Tingkatkan KOLABORASI DENGAN PEMDA



Semakin banyak anggota GAPKI diharapkan bisa mendorong tumbuhnya daerah-daerah ekonomi baru karena masuknya investasi.

Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi meminta GAPKI Sulawesi meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permintaan ini disampaikan dalam pelantikan Pengurus GAPKI Sulawesi dan Dewan Pembina GAPKI Sulawesi periode 2023-2028 di Hotel Claro Kendari pada 25 Agustus 2023. Pelantikan ini dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, pengurus GAPKI Pusat dan perwakilan pengurus GAPKI se-Indonesia.

"Tanaman sawit mulai dikembangkan di Sulawesi Tenggara sejak 1999, baik oleh perusahaan maupun masyarakat," kata Asisten III Setda Provinsi Sulawesi Tenggara, Sukanto Toding yang mewakili pembacaan sambutan Gubernur H. Ali Mazi. Pengembangan perkebunan sawit di daerahnya tersebar di delapan kabupaten yakni Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Muna dan Muna Barat.

GAPKI Cabang Sulawesi menaungi semua perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sulawesi. Pelantikan Pengurus dan Dewan Pembina GAPKI Sulawesi periode 2023-2028 dilakukan oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono. "GAPKI harus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah agar kehadiran organisasi ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

"Kalau bisa semua menjadi anggota GAPKI, supaya apa? supaya pemerintah daerah juga diuntungkan, koordinasi dengan perusahaan perkebunan lebih gampang kalau melalui asosiasi,"

luas," kata Eddy Martono. Kontribusi sektor sawit dalam pembangunan Sulawesi cukup besar dan dapat dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun. "Kalau bisa semua menjadi anggota GAPKI, supaya apa? supaya pemerintah daerah juga diuntungkan, koordinasi dengan perusahaan perkebunan lebih gampang kalau melalui asosiasi,"

Eddy Martono berharap GAPKI Sulawesi dapat mengajak perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sulawesi bergabung menjadi anggota. "Kalau bisa semua menjadi anggota GAPKI, supaya apa? supaya pemerintah daerah juga diuntungkan, koordinasi dengan perusahaan perkebunan lebih gampang kalau melalui asosiasi," katanya. Semakin banyak anggota GAPKI diharapkan bisa mendorong tumbuhnya daerah-daerah ekonomi baru karena masuknya investasi. Contohnya perkembangan Sulawesi Barat yang sekarang menjadi provinsi sendiri.

GAPKI Sulawesi dipimpin oleh Dony Yoga Perdana dari PT Surya Raya Lestari sebagai ketua. Ia didampingi oleh Novrianto dari PT Unggul Widya Teknologi Lestari sebagai sekretaris dan Toran Sidabutar dari PT Pasang Kayu sebagai sekretaris. Sedangkan Dewan Pembina dipimpin oleh Muthar Tano dari PT Manakara Unggul Lestari sebagai ketua didampingi oleh Cahyo Kurniawan Wahyu Tono dari PT Letawa sebagai wakil ketua. ●



GAPKI Tambah Cabang, GAPKI Papua Terbentuk di Bumi Cendrawasih

*"Kami mengapresiasi kehadiran cabang baru GAPKI Papua yang telah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar,"
kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono.*

Upaya perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua untuk mengusulkan pembentukan GAPKI Cabang Papua akhirnya terwujud. Setelah melewati berbagai pertimbangan akhirnya GAPKI Papua dibentuk untuk pertama kali. Tulus Sianipar, seorang pengusaha ternama di Papua yang banyak beraktivitas di bumi cenderawasih dipercaya memimpin organisasi para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang baru ini. Tulus Sianipar juga dikenal sebagai Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Papua.

Pelantikan Pengurus GAPKI Papua periode 2023-2028 dilakukan oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Yogyakarta pada 14 Juli 2023. "Dengan hadirnya GAPKI Cabang Papua kami berharap peran dan kontribusi komoditas kelapa sawit semakin signifikan untuk masyarakat Papua," kata Eddy Martono.

Sebelum kepengurusan GAPKI Cabang Papua terbentuk, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di tanah Papua sudah melakukan

berbagai aktivitas. Selain kesempatan kerja untuk masyarakat setempat, beberapa kegiatan sosial juga rutin diselenggarakan. Salah satunya adalah kegiatan ekonomi produktif seperti peternakan ayam petelur dan perikanan bandung untuk empat pondok pesantren dan satu sekolah Kristen.

"Kami mengapresiasi kehadiran cabang baru GAPKI Papua yang telah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar," katanya. GAPKI Papua memiliki anggota sebanyak 9 perusahaan dengan luas lahan mencapai 35.341 hektar. Cabang baru ini mewakili perusahaan sawit yang tersebar di lima provinsi baru di Papua. GAPKI Papua diharapkan berkembang dan anggotanya bertambah sehingga peran dan kontribusi pada masyarakat semakin dirasakan manfaatnya.

Luwy Leunufna dari Tunas Sawa Erna Group mengatakan kehadiran perkebunan sawit di Papua terbukti meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi tidak kecil terutama mengkomunikasikan kepada semua pihak seperti lembaga swadaya masyarakat. "Ini tantangan. Tapi, dengan kehadiran GAPKI Papua kami tidak lagi berjuang sendirian," katanya. ●



Sinkronisasi Program Riset GAPKI dan BDPDKS

Posisi GAPKI sebagai calon pengguna hasil riset dan pengembangan,” katanya.

Bidang Riset & Pengembangan GAPKI melakukan sinkronisasi dan koordinasi program riset dan pengembangan bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPDKS). Langkah ini dilakukan dengan menemui Komite Penelitian dan Pengembangan BDPDKS pada 30 Mei 2023 di Jakarta. GAPKI diwakili oleh Ketua Bidang Riset & Pengembangan Dwi Asmono yang didampingi sembilan anggotanya. BDPDKS diwakili oleh anggota Komite Penelitian dan Pengembangan yaitu Prof. Didiek H. Goenadi, Dr. Tony Liwang dan Prof. Bustanul Arifin.

Menurut Dwi Asmono, program Grant Riset Sawit (GRS) BDPDKS sudah sejalan dengan program riset dan pengembangan GAPKI. Karena itu, diperlukan kolaborasi antar institusi untuk dapat menjalankan program riset dan pengembangan. “Posisi GAPKI sebagai calon pengguna hasil riset dan pengembangan,” katanya. Karena itu, GAPKI beraudiensi dengan beberapa riset dari pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi, dan lembaga lain seperti BDPDKS. Bidang Riset & Pengembangan GAPKI sendiri memiliki tiga program utama.

Prof. Bustanul Arifin mengapresiasi GAPKI yang sedang mengerjakan *demand-driven research* yakni, kebutuhan riset yang datang dari calon pengguna. Dari seluruh kebutuhan riset ini dapat diterjemahkan oleh peneliti Indonesia sehingga menghasilkan riset yang bermanfaat langsung. Dalam hal ini, BDPDKS berkontribusi mendukung riset dengan dukungan dari dana sawit.

Sementara itu, Dr. Tony Liwang menyarankan GAPKI berfokus pada *Best Management Practices*

RISET

Mengkaji aspek-aspek utama yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas sawit dan kelestarian lingkungan.



INOVASI

Pengembangan teknologi praktis untuk peningkatan produktivitas seperti teknologi mekanisasi dan digitalisasi sampai strategi percepatan PSR.



BEST PRACTICES MANAGEMENT

Mendukung implementasi BMP melalui penyediaan panduan dan pembinaan BPM untuk petani plasma dan swadaya serta mendukung kampanye sawit baik.



3
Program Utama Bidang Riset & Pengembangan GAPKI

karena menghasilkan *output* yang lebih atraktif dan komunikatif. “Misalnya berupa *e-catalog* atau *e-book* yang atraktif, jangan dalam bentuk laporan pada umumnya,” katanya. Hasil riset ini bisa disampaikan kepada BDPDKS agar didanai atau diberikan insentif pada *intangible value*.

Plt. Direktur Penyaluran Dana BDPDKS Zaid Burhan Ibrahim mengatakan BDPDKS berkomitmen meningkatkan kemajuan industri sawit melalui riset dan pengembangan. Berharap hasil riset yang didanai ini dapat dimanfaatkan oleh Industri sawit, pemerintah maupun masyarakat. ●





GAPKI Perkuat Sinergi dengan Media Massa

PWI memberikan apresiasi kepada GAPKI yang mengadvokasi dunia usaha secara konsisten.

Media massa adalah mitra strategis GAPKI dalam sosialisasi program, keberpihakan terhadap perusahaan sawit, hingga strategi komunikasi melawan kampanye negatif terhadap industri sawit nasional.

Untuk menjaga silaturahmi dengan media, GAPKI berpartisipasi dengan menjadi salah satu narasumber dalam Gala Dinner Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) XXV di Gedung Sate, Bandung pada 24 September 2023. Sekretaris Jenderal GAPKI, M. Hadi Sugeng mewakili organisasi dalam kegiatan ini.

Kepada peserta kongres, M. Hadi Sugeng menjelaskan kondisi kondisi perkebunan kelapa sawit nasional yang menghadapi tantangan di dalam dan luar negeri. Eskalasi politik global sangat berpengaruh pada kinerja ekspor minyak sawit nasional. "Dalam beberapa tahun ini, produksi minyak sawit stagnan di angka 51 juta ton," katanya. Kinerja ekspor juga turun akibat fluktuasi harga. Padahal secara volume ekspor cenderung meningkat. Dengan situasi ini, Indonesia masih menguasai 58% pasar minyak nabati dunia atau 40% pasar lebih pasar CPO global.

"Kami akan terus menyuarakan pentingnya industri sawit dan mendorong keberlanjutan industri ini bagi bangsa,"

Sedangkan tantangan di dalam negeri juga tidak kalah besar, terutama kebijakan yang memberi dampak langsung maupun tidak langsung terhadap industri sawit.



"Setelah kami petakan ada 31 instansi pemerintah dari daerah hingga pusat yang terlibat dalam pengambilan kebijakan," katanya. Banyaknya instansi yang terlibat membuat ruang terjadinya tumpang tindih kebijakan. Contohnya lahan sawit yang diidentifikasi masuk kawasan hutan. Padahal, lahan yang dimaksud sudah mendapatkan HGU atau SHM untuk petani.

Dalam contoh kasus ini, pemerintah mengimplementasikan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang membebaskan denda administratif bagi pelaku usaha. Selain itu, peng serta pengusaha juga wajib mengembalikan lahan perkebunan menjadi kawasan hutan setelah satu daur tanaman kelapa sawit. "GAPKI mengharapkan kepastian kebijakan agar tercipta industri yang berkelanjutan dan kesinambungan investasi," katanya.

Bendahara PWI Mohamad Ihsan memberikan apresiasi kepada GAPKI yang mengadvokasi dunia usaha secara konsisten. Apalagi sawit adalah industri strategis bagi perekonomian Indonesia karena kontribusi ekonomi dan sosialnya signifikan. "Kami akan terus menyuarakan pentingnya industri sawit dan mendorong keberlanjutan industri ini bagi bangsa," katanya. ●



GAPKI Membangun Relasi Media Secara Konsisten



Dalam diskusi ini media mendapatkan update informasi dari GAPKI. Begitu pun sebaliknya GAPKI mendapat masukan dan perspektif media terhadap isu yang sedang berkembang.



Bagi organisasi seperti GAPKI, relasi yang baik dengan media massa menjadi salah satu faktor penting membangun citra positif asosiasi maupun industri sawit nasional. Berbagai program dilakukan oleh GAPKI Pusat maupun GAPKI Cabang dengan media dalam beberapa bulan ini. Dengan relasi yang baik diharapkan media memiliki pemahaman yang komprehensif sehingga informasi yang dibagikan kepada publik bersifat konstruktif dan mencerahkan. Relasi dengan media menjadi bagian dari strategi komunikasi GAPKI.

Salah satu program yang telah dijalankan adalah Pemred Gathering di Restoran Bunga Rampai di Jakarta pada 18 Agustus 2023. Acara ini diikuti oleh 40 pemimpin redaksi media nasional di Indonesia. Berbagai masalah dan isu terkini yang terjadi di industri sawit menjadi materi diskusi yang dipandu oleh Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia, Maria Benjamin. Dalam diskusi ini media mendapatkan *update* informasi dari GAPKI. Begitu pun sebaliknya GAPKI mendapat masukan dan perspektif media terhadap isu yang sedang berkembang.

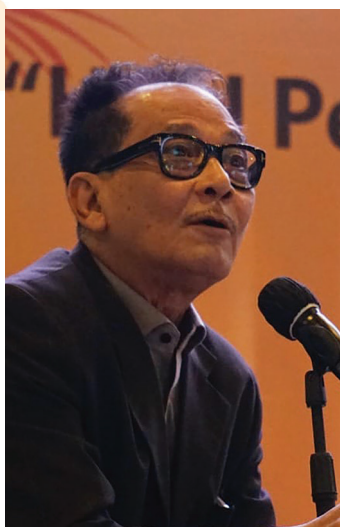
Selain bertemu pemimpin redaksi, GAPKI juga menyelenggarakan *Workshop Wartawan* di Green Forest Resort, Bandung pada 22-24 Agustus 2023. *Workshop* ini berfokus pada tema tentang *HGU Perkebunan Sawit dan Kawasan Hutan*. Materi ini

sangat penting untuk memberi perspektif yang telah tentang kawasan hutan dan perkebunan sawit. Sebanyak 30 wartawan dari Jakarta dan perwakilan wartawan dari Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan diundang sebagai peserta.

Topik yang dibahas sangat menarik yakni tentang tumpang tindih lahan kawasan hutan dan perkebunan kelapa sawit. “Tantangan yang dihadapi industri sawit tidak hanya datang dari luar negeri, tapi juga dari dalam negeri,” kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dalam sambutan workshop. Salah satu masalah yang dihadapi industri sawit antara lain kewajiban pembangunan kebun masyarakat (FPKM) sebesar 20%. “Padahal sesuai Permentan 26 tahun 2007 semestinya FPKM tidak berlaku bagi perusahaan yang sudah bermitra,” katanya.

Untuk membahas beragam isu menarik ini, GAPKI menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang antara lain Dr. Eugenia Mardanugraha, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; I Gede Pantja Astawa, guru besar hukum tata negara Universitas Padjadjaran; Dr. Sadino, pakar hukum Universitas Al Azhar, Mukhamad Faisol Amir dari Center for Indonesian Policy Studies (CiPS). Narasumber dari GAPKI adalah Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono dan Ketua bidang luar Negeri Fadhil Hasan. ●

“Media berperan besar terhadap persepsi masyarakat, bahkan menjadi keyakinan bersama.”



Selain itu, GAPKI juga melayani media massa dalam wawancara khusus untuk membahas isu-isu terkini industri sawit nasional. GAPKI menerima kunjungan wartawan dari *New Strait Times*, *Xinhua*, dan *ABC Australia* dalam wawancara khusus. Begitu juga dengan media nasional seperti *CNBC Indonesia* dalam tayangan live. Di sisi lain, GAPKI juga mengajak delapan wartawan media nasional dan satu wartawan Malaysia untuk mengikuti perlehatan *The Second Sustainable Vegetable Oils Conference (SVOC)* di Mumbai, India pada 27 September 2023.

Relasi dengan media tidak hanya dibangun oleh GAPKI Pusat. Pada 20 Oktober 2023, GAPKI Sulawesi bekerjasama dengan PWI Sulawesi Tebgh mengadakan *workshop* yang diikuti oleh 50 orang wartawan yang bertugas di Sulawesi Tengah. Tema yang diangkat adalah *Konflik Agraria dan Implikasi Hukum di Indonesia*. Wworkshop ini diadakan di Hotel Palu Golden, Palu. Even ini dihadiri oleh Ketua GAPKI Sulawesi Doni Yoga Perdana, Perwakilan GAPKI Pusat yang hadir secara virtual, dan Ketua PWI Sulteng Tri Putra Toana.

Ketua GAPKI Sulawesi, Doni Yoga Perdana mengatakan *workshop* ini adalah momentum untuk merangkul jurnalis agar dapat memberikan masukan yang membangun bagi GAPKI Sulawesi. “Media berperan besar terhadap persepsi masyarakat, bahkan menjadi keyakinan bersama. Kekuatan jurnalis sebagai pembawa pesan rakyat akan didengar pemangku kebijakan bahkan melahirkan kebijakan baru,” katanya. ●

